



## KONTRIBUSI MODAL SOSIAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PEDAGANG KAKI LIMA PASCARELOKASI

Eko Handoyo✉

Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang

### Article History

Received : June 2013  
Accepted : August 2013  
Published : Sept 2013

### Keywords

Contributions;  
Social Capital; Welfare;  
Street Vendors

### Abstrak

Artikel ini membahas kontribusi modal sosial terhadap peningkatan kesejahteraan pedagang kaki lima (PKL). Penelitian dilakukan di Kota Semarang. Wilayah PKL yang diteliti adalah jalan Menteri Soepeno. Pemerintah Kota Semarang merelokasi PKL di wilayah Jalan Pahlawan ke jalan Menteri Supeno sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan Kota Semarang sebagai pusat perdagangan dan jasa berskala internasional. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya peran modal sosial bagi pedagang kaki lima untuk bertahan di masa-masa sulit seperti relokasi. PKL yang dipindahkan ke jalan Menteri Soepeno dapat menerima kebijakan pemkot dan beradaptasi secara sosial dan ekonomi dengan lingkungan baru. Modal sosial, utamanya *trust* dan *networking* berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang. Untuk meningkatkan kesejahteraan PKL, pemerintah kota perlu mendukung dan mengembangkan modal sosial yang telah mereka miliki.

## CONTRIBUTION OF SOCIAL CAPITAL IN IMPROVING THE SOCIAL WELFARE OF STREET VENDORS AFTER RELOCATION

### Abstract

*This article discusses the contribution of social capital to the welfare of street vendors (PKL). The study was conducted in the city of Semarang. The subjects of study is the street vendors in Menteri Soepeno Street Semarang. Semarang city government relocate the street vendors in the area from Jalan Pahlawan to Menteri Supeno as part of its effort to realize the Semarang city as a center of international trade and services. The results showed the importance of the role of social capital for street traders has to survive in difficult times such as relocation. PKL transferred to the road Soepeno Minister can receive local government policies and adapt socially and economically to the new environment. Social capital, particularly trust and networking contribute to improving the welfare of traders. This study concludes that to improve the welfare of street vendors, the city government needs to support and develop the social capital that they have.*

© 2013 Universitas Negeri Semarang

✉ Corresponding author:  
Address: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang  
E-mail: [eko\\_pkn@yahoo.co.id](mailto:eko_pkn@yahoo.co.id)

ISSN 2086-5465

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat urbanisasi tertinggi di Asia Tenggara, 32 persen orang miskin tinggal di wilayah perkotaan (Morrell, dkk. 2008 :1). Sebagian besar penduduk miskin perkotaan bekerja di sektor informal, yang pertumbuhannya sudah melebihi sektor formal (Manning and Roesad. 2006). Sektor informal menjadi pilihan terakhir warga urban (kota) yang tidak berpendidikan dan tidak berketerampilan yang tidak terserap di sektor formal. Sethuraman (1976) dalam penelitian di Ghana, melaporkan bahwa penduduk yang terjun ke sektor informal dikarenakan keterampilan mereka tidak ada, sehingga sektor formal tidak mampu menyerap mereka.

Di Indonesia, sektor informal menjadi katup pengaman dalam menghadapi masalah angkatan kerja yang tidak terserap dan terlempar dari sektor formal sejak terjadinya krisis ekonomi (Ari. 2008: 12). Krisis yang menghantam bangunan ekonomi Indonesia mengakibatkan jumlah pengangguran mencapai titik kritis. Diperkirakan sekitar 5,4 juta pekerja formal yang bergerak di bidang jasa, manufaktur, dan konstruksi diberhentikan dari pekerjaannya sebagai akibat krisis ekonomi. Kenaikan harga barang dan jasa membuat para penganggur dan mereka yang miskin sulit melakukan penyesuaian diri, apalagi bertahan hidup tanpa penghasilan yang pasti. Solusinya adalah mereka masuk ke sektor informal agar dapat bertahan hidup.

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah berlomba-lomba meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dampaknya, sektor informal dirugikan, karena kebijakan pemerintah daerah lebih berpihak kepada para investor yang mengelola kegiatan ekonomi formal. Selain itu, demi dan atas nama penghargaan adipura, pemerintah daerah dipaksa untuk membersihkan dan merapikan kota, sehingga sektor informal atau pedagang kaki lima (PKL) yang dipandang mengotori kota, ditertibkan dan dipinggirkan.

Adipura bagi pemerintah kota lebih

penting ketimbang keberadaan PKL, sebagaimana ditunjukkan kebijakan pemerintah Kota Semarang ketika hendak meraih penghargaan adipura pada tahun 2010. Untuk mewujudkan citra bersih, tertib, dan indah demi meraih penghargaan adipura, Pemkot Semarang pada tanggal 27 April 2010 menertibkan PKL yang berdagang di kawasan Johar, kawasan pasar burung di jalan Kartini, dan ruas-ruas jalan utama di Kota Semarang (Kompas Edisi Jawa Tengah, Sabtu 1 Mei 2010). Ambisi mendapatkan adipura dengan mengorbankan eksistensi PKL tidak berhasil diraih, padahal 14 kota lainnya di Jawa Tengah berhasil memperolehnya (Harian Semarang, Kamis 10 Juni 2010).

Penataan PKL tidak hanya ketika ada kebutuhan untuk meraih adipura. Pertumbuhan yang cepat dari sektor informal, terutama PKL liar, membuat Pemkot Semarang mengambil tindakan untuk menata keberadaan mereka. PKL yang tidak berada dalam jalur aturan hukum, berada di luar zonasi yang telah ditentukan pemerintah, tidak tertib, menyebabkan kemacetan, penumpukan sampah, pencemaran, mengganggu kesehatan dan sanitasi ditata sedemikian rupa, sehingga diharapkan kualitas ruang kota sesuai dengan standar minimum sebuah kota yang nyaman, asri, dan indah.

Umumnya persepsi aparat pemerintah daerah terhadap PKL adalah pengganggu ketertiban, keindahan, dan kebersihan kota, sehingga menyebabkan perilaku mereka tidak ramah dan cenderung memusuhi PKL. Tidak jarang melalui aparatnya, melakukan tindakan represif dan brutal terhadap PKL (Ramli. 1992; Bromley. 2000). Hal ini dialami oleh para otoritas dan elit kota di negara-negara Afrika, Asia, dan Amerika Latin, yang mengeluhkan keberadaan PKL sebagai masalah utama di kota-kota mereka (Bromley. 2000). Itulah sebabnya, banyak elit dan pemegang otoritas kota bertindak membersihkan kota dari keberadaan PKL, khususnya PKL liar. Pertumbuhan yang cepat dari PKL, membuat Pemkot Semarang mengambil tindakan untuk menata keberadaan mereka yang liar dan tidak terkendali.

Namun demikian, PKL yang lebih banyak menjajakan barang murah (diantara-

nya barang-barang bekas) dan jasa yang terjangkau biayanya, sangat dibutuhkan oleh warga kota yang memiliki penghasilan pas-pasan. PKL dibenci oleh penguasa, tetapi di lain pihak dirindukan oleh warga kota yang memiliki pendapatan rendah.

Problematika PKL ini akan terus menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah, termasuk pemerintah Kota Semarang. Masalah PKL menimbulkan dilema. Di satu sisi, penguasa daerah menginginkan kota harus bersih, indah, dan nyaman, sehingga dapat menjadi ruang publik yang sehat dan nyaman bagi seluruh warga kota. Pada sisi lain, PKL sebagai warga negara membutuhkan pekerjaan untuk hidup dan menghidupi keluarganya. Dilema ini yang sulit dipecahkan oleh hampir semua pemerintah daerah, termasuk pemerintah Kota Semarang.

PKL umumnya menempati lokasi di daerah pusat perkantoran, bisnis, perbankan, pendidikan, pariwisata, pasar tradisional dan modern. Di Kota Semarang, konsentrasi PKL ada di Barito, Kalisari, Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, Kantor Bank Indonesia, Pasar Johar, Bundaran Simpang Lima, Sampangan, rumah sakit, dan pusat-pusat keramaian lainnya. Seiring dengan perkembangan pesat Kota Semarang dalam 15 tahun terakhir, PKL dengan mudah dapat dijumpai, mulai dari tengah kota hingga pinggiran kota. Keberadaan PKL bagai jamur di musim penghujan. Mereka tersebar tidak hanya di satu kecamatan, tetapi hampir seluruh kecamatan yang ada di Kota Semarang terdapat PKL baik yang resmi maupun yang tidak resmi (liar).

Menurut data Dinas Pasar Kota Semarang, jumlah PKL pada tahun 2009 mencapai 11.414 dengan rincian 7.419 sesuai Perda No. 11 Tahun 2000 dan SK WaliKota Semarang Nomor 130.2/339 Tahun 2000 dan SK Walikota Nomor 511.3/16 Tahun 2001 dan 3.995 PKL tidak sesuai Perda dan SK Walikota. Jumlah tersebut diperkirakan kian bertambah seiring dengan perkembangan Kota Semarang sebagai kota metropolitan.

Dalam rangka mewujudkan program SETARA atau Semarang kota sejahtera dan mencapai visi Semarang sebagai kota per-

dagangan dan jasa, Pemkot Semarang melakukan penataan fisik kota, diantaranya merapikan bundaran Simpang Lima, jalan Pahlawan, jalan Pandanaran, jalan Ahmad Yani, jalan Gajahmada, jalan Pemuda, jalan dr. Sutomo, jalan Imam Bonjol, jalan Sugiyo-nopranoto, dan bundaran Tugu Muda. PKL yang menempati jalan Pahlawan direlokasi ke pusat PKL jalan Menteri Soepeno sejak Desember 2010. Semula mereka bersikeras tidak mau pindah, tetapi setelah dilakukan sosialisasi dan pendekatan dari pihak pemerintah, akhirnya mereka bersedia pindah ke jalan Menteri Soepeno.

Persoalan yang muncul adalah di jalan Menteri Soepeno sudah ada pedagang yang sejak lama berjualan. Mereka adalah para pedagang gimbal udang dan es campur. Beberapa lainnya adalah pedagang jagung bakar dan penjual helm. Hal ini tentu dapat menimbulkan permasalahan, terkait dengan kedatangan mereka yang belum tentu dapat diterima sepenuhnya oleh pedagang yang sudah lama melakukan aktivitas ekonomi di jalan Menteri Soepeno. Permasalahan lain juga muncul, yaitu bagaimana PKL Pahlawan beradaptasi dengan lingkungan baru terkait dengan kelangsungan usaha mereka. Persoalan-persoalan ini menarik untuk diteliti.

Berdasarkan latar belakang di atas, tulisan ini hendak menjawab pertanyaan pokok yaitu “seberapa besar modal sosial memberi sumbangan terhadap kesejahteraan Pedagang Kaki Lima pasca kepindahannya ke jalan Menteri Soepeno Semarang?”

Konsep modal sosial sudah lama dibicarakan oleh para ahli ekonomi, kira-kira pada abad 19 yang lalu (Castiglione, et.al.2008 :2). Istilah modal sosial itu sendiri baru muncul untuk pertama kalinya pada tahun 1916 ketika Lyda Hudson Hanifan menulis tentang *The Rural School Community Center* (Moelyono. 2010). Perbincangan tentang modal sosial ini mengemuka, dikarenakan para ahli ekonomi menyadari bahwa untuk menggerakkan aktivitas ekonomi, tidak semata-mata bertumpu pada modal manusia, modal fisik, maupun modal finansial, tetapi ada jenis modal lain yang terny-

ata efektif dalam melumasi kegiatan ekonomi, bahkan dapat memperoleh hasil yang lebih baik ketimbang hanya mengandalkan modal manusia, fisik, dan finansial, yaitu modal sosial. Literatur tentang modal sosial cukup banyak, bahkan dapat dikatakan melimpah. Namun dari semua pandangan tentang modal sosial, sumber yang sering digunakan oleh para penulis dan peneliti modal sosial adalah Coleman, Putnam, Fukuyama dan Bourdieu.

Coleman menggunakan konsep modal sosial dalam penelitiannya tentang pendidikan. Coleman (2000) menemukan bahwa modal sosial, baik berupa harapan dan kewajiban, jaringan dan informasi, serta norma sosial, berpengaruh secara positif dalam menambah volume modal kemanusiaan baik dalam lingkup keluarga maupun komunitas. Konsep modal sosial yang dielaborasi dalam penelitian Coleman tersebut adalah relasi sosial. Menurut Coleman, relasi sosial menggambarkan suatu struktur sosial di mana individu bertindak sebagai sumber bagi individu lainnya (Castiglione, et al. 2008). Coleman meyakini bahwa analisis tentang formasi modal sosial menyediakan suatu jalan tengah antara perspektif pilihan rasional yang memandang tindakan sosial sebagai hasil tindakan berbasis kepentingan diri yang bertujuan dari individu dan perspektif norma sosial yang menjelaskan perilaku sosial sebagai tergantung pada batasan-batasan eksternal yang dipaksakan oleh norma (Castiglione, et al. 2008; Field 2008). Pendek kata, modal sosial adalah cara mendamaikan tindakan individu dan struktur sosial.

Putnam (2000) dalam bukunya *Bowling Alone*, mendefinisikan modal sosial sebagai bagian dari organisasi sosial, seperti kepercayaan, norma, dan jaringan, yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan-tindakan terkoordinasi. Dalam penelitian di Italia utara dan selatan, Putnam (2000) menyimpulkan bahwa kinerja institusional di Italia utara relatif sukses dikarenakan adanya hubungan timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat sipil. Dalam penelitian itu ditunjukkan pula bahwa dukungan ma-

sarakat sipil ditambah efektivitas institusi pemerintah daerah Italia utara memiliki tingkat kemakmuran yang lebih baik daripada pemerintah Italia wilayah selatan. Modal sosial seperti tingkat pendidikan, keterbukaan, dan institusi yang efektif memberi kontribusi signifikan bagi kepuasan warga negara kepada pemerintah daerah. Menurut Helliwel (2006: 38), kepuasan hidup (*life satisfaction*) berhubungan dengan berbagai jenis kepercayaan (*trust*) dan juga jaringan (*networks*) yang boleh jadi menelurkan atau mendukung kepercayaan. Kepuasan warga negara terhadap kinerja pemerintah Italia utara yang pada gilirannya memberi kemakmuran kepada mereka, menimbulkan kepercayaan (*trust*) yang tinggi kepada pemerintah.

Kepercayaan merupakan modal sosial berharga yang menentukan keberhasilan perusahaan. Kepercayaan dibangun dengan kejujuran, kesetiaan, dan kerjasama. Kepercayaan (modal sosial) ini ternyata tidak terbagi secara merata di masyarakat. Dalam masyarakat individualistik, kepercayaan berada pada asosiasi sukarela (misalnya di Amerika Serikat) yang menentukan berkembangnya perusahaan-perusahaan besar, sedangkan pada masyarakat tipe *familistik* (seperti di Korea, Taiwan, dan Hongkong), kepercayaan berada pada jalur keluarga, sehingga di sana berkembang perusahaan-perusahaan kecil berbasis keluarga. Dalam bukunya berjudul *Guncangan Besar Kodrat Manusia dan Tata Sosial Baru*, Fukuyama (2005) menemukan adanya kemunduran hierarki birokratis dalam bidang politik dan ekonomi seiring dengan berkembangnya teknologi informasi. Produksi berbasis industri pun mengalami transisi ke arah bentuk produksi berbasis informasi. Sistem kepemimpinan hierarkis mengalami erosi dan model jaringan yang bertandakan hubungan informal dan persekutuan antar-organisasi, sebagaimana dapat disaksikan pada sistem *keiretsu* di Jepang, persekutuan perusahaan di Italia, dan hubungan Boeing dengan pemasoknya, dapat menutup kelemahan dari sistem hierarkis. Pertukaran dalam model jaringan, menurut Fukuyama (2005) bersifat timbal balik, tidak semata-

mata berdasarkan prinsip untung rugi. Hal ini terjadi karena pertukaran dalam jaringan berbasis norma bersama bersifat informal, tidak mengharapkan balasan langsung, tetapi mendambakan manfaat jangka panjang. Jaringan ini merupakan bagian penting dari modal sosial. Pada level individual, anggota jaringan akan memperoleh keuntungan, misalnya meningkatkan akses pada pertukaran informasi, penegakan kontrak, dan fokus pada visi dan tujuan kolektif (Beugelsdijk. 2002).

Berbeda dengan Coleman, Putnam, dan Fukuyama, Pierre Bourdieu dalam penelitiannya di Aljazair, memasukkan modal budaya sebagai bagian dari modal sosial. Modal sosial ini, merupakan milik eksklusif elit yang didesain untuk mengamankan posisi dan status mereka (Field. 2008). Bourdieu yakin bahwa tidak ada tempat bagi individu dan kelompok lain yang kurang istimewa (bukan elit) yang dapat memperoleh keuntungan dalam ikatan sosial mereka. Dalam tulisan berjudul Kekerasan Simbolis dan Reproduksi Sosial, Bourdieu (dalam Jenkins. 2004), percaya bahwa elit atau penguasa dapat menggunakan kekerasan simbolis, yaitu suatu pemaksaan sistem simbolisme dan makna terhadap kelompok sedemikian rupa, sehingga hal itu dialami sebagai sesuatu yang sah atau memiliki legitimasi. Legitimasi dibangun untuk meneguhkan relasi kekuasaan yang menyebabkan pemaksaan tersebut berhasil. Kebudayaan dipakai sebagai sistem makna untuk memperkuat dirinya melalui relasi kekuasaan yang memberikan kontribusi kepada reproduksi sistematis mereka. Hal ini dilakukan melalui proses *misrecognition*, yaitu proses di mana relasi kekuasaan tidak dipersepsikan secara objektif, namun dalam bentuk yang menjadikan mereka (elit) absah di mata pendukungnya. Penggunaan kekerasan simbolik pada prinsipnya merupakan tindakan pedagogis. Tindakan pedagogis ini mencerminkan kepentingan kelompok atau kelas dominan yang cenderung mereproduksi distribusi modal kultural secara tidak merata antarkelompok atau antarkelas yang hidup dalam ruang sosial, sehingga mereproduksi struktur sosial. Tin-

dakan pedagogis memerlukan otoritas pedagogis sebagai prasyarat keberhasilan tindakan pedagogis. Otoritas ini merupakan kekuasaan *arbitrer* untuk bertindak tanpa disadari oleh pelaku dan para penganutnya sebagai sesuatu yang absah. Tindakan pedagogis dihasilkan oleh kerja pedagogis, yaitu suatu proses indoktrinasi yang berlangsung cukup lama melalui apa yang oleh Bourdieu disebut dengan habitus. Kerja pedagogis ini merupakan pengganti kerja fisik dan koersi.

Konsep kekerasan simbolik Bourdieu mirip dengan konsep hegemoni Gramsci. Konsep hegemoni menawarkan gagasan tentang bagaimana kekuasaan bisa diterima oleh pihak yang dikuasai (Sugiono. 1999). Melalui hegemoni, pihak *ruling class* atau siapapun yang ingin memiliki kekuasaan menancapkan hegemoni melalui kepemimpinan moral dan intelektual secara konsensual. Konsep hegemoni ini berbeda dengan dominasi. Kekuasaan dalam dominasi ditopang oleh kekuatan fisik, sedangkan dalam hegemoni, kekuasaan kelompok atau elit diperoleh secara konsensual. Dari strateginya yang tidak mengandalkan kekuatan fisik dan koersi, maka dapat disimpulkan bahwa konsep hegemoni Gramsci tidak berbeda secara substansial dengan konsep kekerasan simbolik Bourdieu. Kebanyakan pemerintah daerah, termasuk juga Pemkot Semarang dalam melaksanakan pembangunan tidak jarang menggunakan kekerasan simbolik (biasanya dalam bentuk peraturan daerah atau peraturan bupati/walikota) untuk memaksa warga masyarakat mematuinya. Kekerasan simbolik atau hegemoni dilakukan dengan dalih untuk dan atas nama pembangunan, yang pada gilirannya dapat memperteguh keabsahan kekuasaan pemerintah daerah.

Modal sosial memiliki peran dan kontribusi positif bagi masyarakat miskin dan termajinalkan. Berikut ini disajikan beberapa hasil penelitian, yang menunjukkan peran modal sosial bagi kelompok miskin dan termarginalkan, utamanya PKL. Dalam penelitian PKL di Phnom Penh Kamboja, Kusakabe (2006) menemukan bahwa asosiasi PKL yang dibentuk, memberi kontribusi yang signifikan kepada kehidupan

PKL, diantaranya menyediakan kredit murah kepada PKL, memberi dukungan akses layanan kesehatan, layanan penjagaan anak, dan memberikan training hak dan hukum. PKL yang tergabung dalam asosiasi menyatakan bahwa *“they will be able to improve their life in future and they belief their life will be better in the future”* (Kusakabe, 2006). Penelitian Kusakabe didukung oleh temuan Heihonen (2008) yang menyatakan bahwa sektor informal berperan penting dalam pembangunan ekonomi di ibukota negara Kamboja.

Dalam penelitiannya tentang PKL di Metro Cebu Philipina, Destombes (2010) menyimpulkan bahwa *Cebu City United Vendors Association, Inc* atau disingkat CCUVA berperan memberi dukungan terhadap PKL buah dan bunga di Metro Cebu. Bentuk dukungan yang diberikan diantaranya adalah: (1) perlindungan dari dan selama pembongkaran atau penggusuran, (2) saling membantu satu sama lain, dengan mendorong kerjasama, (3) mengorganisasikan fasilitas dan mengendalikan para pedagang kaki lima, (4) memberikan dukungan pada saat-saat susah atau menderita, (5) bernegosiasi dengan pemerintah lokal mewakili kepentingan pedagang kaki lima, (6) mengorganisasi anggota CCUVA, (7) mengembangkan bisnis, dan (8) sebagai tempat berkonsultasi untuk memahami persoalan yang dihadapi pedagang kaki lima, dan (9) memberikan peluang untuk perbaikan pelayanan. Dalam penelitian Destombes (2010) menunjukkan bahwa peran yang dimainkan CCUVA cukup berhasil, diantaranya adalah (1) regulasi pemerintah terhadap pedagang kaki lima menjadi jelas, (2) pembangunan gedung Carbon dan Pasar Publik Ramos, dan (3) pengakuan terhadap pasar umum dan pedagang kaki lima sebagai mitra pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya dari masyarakat.

Modal sosial yang berkembang dengan baik, utamanya jaringan sosial melalui keanggotaan dalam organisasi PKL, sebagaimana riset yang dilakukan oleh Destombes di atas, memberikan kontribusi yang tidak kecil bagi kelangsungan usaha dan kehidupan para PKL. Perusahaan mikro atau

sektor informal ini dengan pengembangan program yang difasilitasi oleh pemerintah mampu mengentaskan penduduk miskin dari jurang kemelaratan. Modal sosial yang mereka miliki membuat mereka dapat bertahan hidup (*survive*). Dalam kaitan dengan perusahaan mikro ini, Yasmeen (2000: 39) dalam penelitian di Bangkok, mengungkapkan bahwa organisasi *Victory Monument Area (VMA)* yang diikuti oleh sejumlah besar PKL, memengaruhi kebijakan yang diambil oleh pemerintah kota Bangkok melalui Bangkok Metropolitan Administration (BMA). Pada tahun 1990, BMA membuat regulasi mengenai keberadaan PKL di Bangkok. Semula mereka bersikap keras terhadap para PKL, tetapi setelah adanya negosiasi dari VMA, para pejabat lokal Bangkok memberi toleransi kepada PKL untuk berdagang di jalanan. BMA mengambil kebijakan yang disebut dengan *“jut phon pan”*. Dalam bahasa Inggris, *jut* diterjemahkan sebagai *point*, sedangkan *phon pan* diartikan sebagai *less clear*. Haas sebagaimana dikutip Yasmeen (2000) mengartikan *jut phan pon* sebagai *to ease the situation* atau meredakan situasi.

Sebagai bagian dari kebijakan *jut phon pan* ini, BMA mendisain jalanan utama di Bangkok sebagai *vendor friendly*, atau jalanan yang bersahabat bagi PKL. Kebijakan ramah terhadap PKL berlanjut dengan keluarnya kebijakan dari Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, yakni dengan didirikan *People’s Bank* atau *Bank for the Poor*, yang dalam bahasa Thailand adalah *krongkarn thanakarn phu prachachon*. Bank ini didirikan untuk menyediakan keuangan mikro bagi rakyat yang berkeinginan membangun usaha kecil dan mikro, misalnya menjalankan usaha berdagang di jalanan.

Pengaruh modal sosial terhadap pembangunan ekonomi bagi masyarakat kurang mampu, ditunjukkan pula oleh peran yang dimainkan *Self Employed Womens’s Association (SEWA)* di India. Peran SEWA dalam memperjuangkan hak-hak para PKL, diantaranya (1) melobi Departemen Perburuhan Negara Gujarat agar mau memasukkan sektor informal sebagai bagian penting dari kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah lokal, (2) mengajukan usulan kepa-

da Mahkamah Agung India agar mengakui keberadaan PKL, (3) mendesak pemerintah agar memasukkan PKL dalam *National Policy for Street Vendors at Central Level*, (4) mengajukan *Public Interest Litigation* (PIL) di Pengadilan Tinggi (High Court) Gujarat dan mengimplementasikan *National Policy for Urban Street Vendors* di Ahmedabad, (5) melakukan registrasi terhadap PKL dan membentuk The City Street Vending Committee, dan (6) memperjuangkan hak-hak pedagang pakaian bekas untuk memperoleh lahan pencucian, pengeringan, dan penyeterikaan dengan menegosiasi *Ahmedabad Urban Land Development Authority* (AUDA).

Keberhasilan yang dicapai oleh SEWA masih cukup banyak pada bidang atau aspek lainnya. Hal ini membuktikan betapa modal sosial yang terpelihara melalui organisasi yang efektif dapat membantu warga miskin keluar dari belenggu kemiskinan, atau setidaknya dapat bertahan hidup di tengah kesulitan ekonomi yang mereka hadapi.

Kelompok orang kaya memiliki modal sosial yang dapat dimanfaatkan untuk menguasai kelompok miskin. Demikian pula, kelompok orang miskin juga dapat menggunakan modal sosial untuk mendorong mereka keluar dari kutukan kemiskinan dan ketergantungan dari kelompok kaya. Peran modal sosial cukup besar dalam mendorong kelompok miskin keluar dari kantong kemiskinan. Dalam sebuah penelitian tentang peran modal sosial dalam membantu kelompok miskin di Bolivia, Burkina Faso, dan Indonesia, Christiaan Grootaert (2001) menyimpulkan bahwa modal sosial, utamanya keanggotaan dalam asosiasi lokal, merupakan bagian penting dari strategi memerangi kemiskinan. Keterlibatan masyarakat miskin dalam asosiasi lokal (di Indonesia dikenal dengan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dan Program Kesejahteraan Keluarga (PKK)), meskipun sebagian besar dikendalikan oleh Pemerintah, sebagaimana dilaporkan Grootaert, memberikan peran signifikan dalam akumulasi aset, penambahan tabungan, dan akses terhadap kredit. Faktor-faktor tersebut, menurut Grootaert (2001), secara langsung maupun tidak lang-

sung memberi kontribusi terhadap peningkatan pendapatan dan mengurangi kemiskinan rumahtangga. Pada gilirannya, modal sosial tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Dari berbagai penelitian yang dilakukan di atas, dapat ditarik benang merah bahwa modal sosial dapat dikonversi ke banyak kualitas material dari modal ekonomi (Castiglione et al. 2008: 3). Modal sosial pun memiliki kriteria ekonomi, seperti produktivitas, efisiensi, dan efektivitas (Lawang 2005: 33). Hal ini berangkat dari dua asumsi berikut. Pertama, modal sosial tidak berdiri sendiri, melainkan tertambat dalam struktur sosial. Struktur sosial yang dimaksud menunjuk pada hubungan (*relation*), jaringan (*network*), kewajiban dan harapan (*expectation*), yang menghasilkan dan dihasilkan oleh kepercayaan (*trust*) serta sifat dapat dipercaya (*trustworthiness*). Kedua, modal sosial memiliki fungsi yang sama dengan jenis modal lainnya dalam rangka mencapai tujuan ekonomi, seperti fungsi memperlancar (*lubricant*) dan fungsi memperlambat (*glue*) ikatan-ikatan sosial dalam sistem produksi. Seperti halnya sebuah benda, modal sosial dapat diperbanyak, ditambah, dan dilihat sebagai stok. Jaringan sosial yang dikembangkan para PKL, ditengarai memiliki fungsi-fungsi yang mampu menjadi tumpuan bagi kelangsungan usaha mereka. Fungsi-fungsi dimaksud meliputi (1) fungsi informatif, yakni sebagai jaringan informasi yang memungkinkan setiap *stakeholders* dalam jaringan untuk mengetahui informasi yang berhubungan dengan masalah, peluang, atau apa pun yang berkaitan dengan kegiatan usaha, (2) fungsi akses, yaitu menunjuk pada kesempatan yang dapat diberikan oleh adanya jaringan dengan orang lain dalam penyediaan suatu barang atau jasa yang tidak dapat dipenuhi secara internal oleh organisasi, dan (3) fungsi koordinasi, yakni fungsi informal yang membantu mengatasi masalah kebuntuan yang disebabkan oleh keterbatasan birokrasi pemerintah (Lawang 2005: 69).

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa modal sosial, apakah melalui *trust* yang dibangun, norma sosial yang

dipatuhi bersama, atau pun jaringan sosial yang memungkinkan aktor dapat bertindak kolektif, memberikan kontribusi dalam meningkatkan potensi kelompok masyarakat marginal, yaitu kapasitas mereka untuk mengembangkan diri guna memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Semarang, khususnya PKL yang menjalankan usaha di jalan Menteri Soepeno. Unit analisis penelitian ini adalah para pedagang kaki lima yang dulu bekerja di jalan Pahlawan dan sejak tahun 2010 pindah ke jalan Menteri Soepeno.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Semarang adalah ibukota provinsi Jawa Tengah yang menjadi tempat tujuan para urban dari pedesaan di kota-kota di Jawa Tengah. Bahkan banyak juga pendatang yang berasal dari provinsi Jawa Barat. Sebagai ibukota provinsi, tentu saja Semarang ingin berbenah diri seperti layaknya kota besar lainnya guna menarik investor agar mau menanamkan sahamnya di Semarang. Hal ini sejalan dengan visi Wali Kota Semarang, Soemarmo HS, yaitu ingin menjadikan Kota Semarang setara dengan kota metropolitan lainnya, yang dikenal dengan nama SETARA. Visi tersebut mengacu pada Perda Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang RPJPD Kota Semarang Tahun 2005-2025, Perda Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011 tentang RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015, dan Perda Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011-2031.

Dalam RTRW tersebut, penataan Kota Semarang ditujukan untuk mewujudkan Kota Semarang sebagai pusat perdagangan dan jasa berskala internasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan Semarang sebagai pusat perdagangan dan jasa berskala internasional, rencana struktur ruang meliputi rencana pengembangan sistem pusat pelayanan dan rencana pengembangan sistem jaring-

gan. Rencana pengembangan sistem pusat pelayanan mencakupi rencana pembagian wilayah kota (BWK) dan rencana penetapan pusat pelayanan. Rencana pengembangan sistem jaringan meliputi; (1) rencana pengembangan sistem jaringan transportasi, (2) rencana pengembangan sistem jaringan energi, (3) rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi, (4) rencana pengembangan sistem jaringan prasarana sumber daya air, (5) rencana pengembangan sistem jaringan infrastruktur kota, serta (6) rencana pengembangan sistem prasarana dan sarana perkotaan lainnya (Perda Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011).

Sesuai dengan visi dan misi Kota Semarang serta tujuan penataan ruang Kota Semarang, rencana pembagian wilayah kota (BWK) terbagi atas 10 BWK, yaitu: BWK I meliputi Kecamatan Semarang Tengah, Semarang Timur, dan Semarang Selatan dengan luas kurang lebih 2.223 hektar; BWK II meliputi Kecamatan Candisari dan Gajahmungkur dengan luas kurang lebih 1.320 hektar; BWK III meliputi Kecamatan Semarang Barat dan Semarang Utara dengan luas kurang lebih 3.522 hektar; BWK IV meliputi Kecamatan Genuk dengan luas kurang lebih 2.738 hektar; BWK V meliputi Kecamatan Gayamsari dan Pedurungan dengan luas kurang lebih 2.622 hektar; BWK VI meliputi Kecamatan Tembalang dengan luas kurang lebih 4.420 hektar; BWK VII meliputi Kecamatan Banyumanik dengan luas kurang lebih 2.509 hektar; BWK VIII meliputi Kecamatan Gunungpati dengan luas kurang lebih 5.399 hektar; BWK IX meliputi Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 6.213 hektar; dan BWK X meliputi Kecamatan Ngaliyan dan Tugu dengan luas kurang lebih 6.393 hektar.

Masing-masing BWK memiliki fungsi khas, meskipun ada juga yang bersama-sama melaksanakan fungsi tertentu. BWK I, II, dan III digunakan untuk area perkantoran, perdagangan, dan jasa. Pendidikan kepolisian dan olahraga diarahkan di BWK II. Transportasi udara dan laut di BWK III. Industri dikembangkan di BWK IV dan X. Kegiatan pendidikan, utamanya pendidikan tinggi dilaksanakan BWK VI dan VIII.



Perkantoran militer ditempatkan BWK VII. Kantor pelayanan publik dipusatkan di BWK IX.

Rencana penetapan pusat pelayanan Kota Semarang meliputi pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan kota, dan pusat lingkungan. Pusat pelayanan kota ditetapkan di BWK I, II, dan III. Pusat pelayanan skala kota berfungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan kota dan pusat kegiatan perdagangan dan jasa. Sesuai dengan RTRW Kota Semarang, pusat kegiatan pemerintahan dilengkapi dengan fasilitas kantor walikota dan fasilitas kantor pemerintahan pendukung dan pelayanan publik. Sayangnya, di antara kantor walikota dan kantor pemerintahan pendukung lainnya yang berlokasi di jalan Pemuda, terdapat hotel berbintang (hotel Novotel dan Amaris) dan pusat perbelanjaan modern, yaitu DP Mall dan Paragon City, yang tentu saja tidak sesuai dengan peruntukannya sebagai pusat kegiatan pemerintahan. Kedekatan kantor pemerintah dengan fasilitas perbelanjaan, sedikit banyak dapat memengaruhi kinerja pelayanan publik yang dilakukan pegawai pemerintahan kota. Sementara itu, pusat perdagangan dan jasa skala kota dilengkapi dengan pusat perbelanjaan skala kota, perkantoran swasta, dan kegiatan jasa lainnya.

Sub pelayanan kota di masing-masing BWK dilengkapi sarana perdagangan dan jasa, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, dan sarana pelayanan umum. Lokasi pengembangan pusat lingkungan di masing-masing BWK dirinci lagi ke dalam pusat-pusat lingkungan di kelurahan, misalnya di BWK I, pusat lingkungan 1 terdapat di Kelurahan Sekayu dengan daerah pelayanan Kelurahan Pindrikan Lor, Kelurahan Pindrikan Kidul, Kelurahan Pandansari, Kelurahan Kembang Sari, Kelurahan Bangunharjo, Kelurahan Kauman, Kelurahan Kranggan, Kelurahan Purwodinatan, Kelurahan Miroto, Kelurahan Pekunden, Kelurahan Gabahan, Kelurahan Brumbungan, Kelurahan Jagalan, dan Kelurahan Karang Kidul.

Pembagian wilayah kota (BWK) di atas diarahkan untuk mewujudkan visi Kota Semarang sebagai pusat perdagangan dan

jasa. Selain untuk sentra pelayanan publik, BWK juga digunakan untuk menunjang kegiatan industri. Wilayah Simpang Lima dan jalan Pahlawan termasuk dalam BWK yang difokuskan pada aktivitas perkantoran, perdagangan, dan jasa. Agar kegiatan tersebut berjalan lancar, maka pihak pemerintah menghendaki wilayah tersebut bersih, rapi, asri, nyaman, dan aman. Sebelum ditata, bundaran Simpang Lima baik siang maupun malam hari terkesan semrawut, ruwet, dan kumuh. Itulah sebabnya, pemkot lakukan penataan agar wilayah tersebut terkesan elok, rapi, dan sedap dipandang mata.

Dalam rangka menata kawasan Simpang Lima, Pemkot Semarang telah mengeluarkan dana sebesar Rp. 15 milyar. Dana ini digunakan untuk mempercantik kawasan bundaran Simpang Lima. Ketika ditanya, mengapa pemkot harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp. 15 milyar untuk menata kawasan Simpang Lima, Walikota beralasan karena Simpang Lima sudah lama menjadi ikon Kota Semarang dan Simpang Lima juga merupakan wajah utama Kota Semarang (Harian Semarang, Kamis, 26 Agustus 2010, halaman 2).

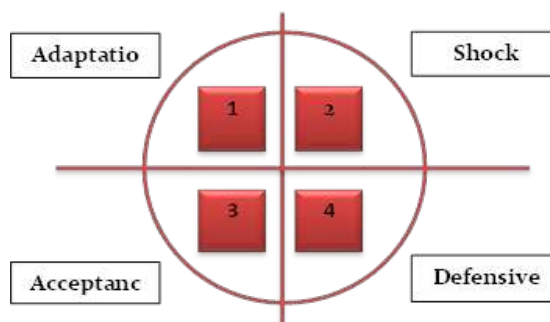
Oleh karena kawasan Simpang Lima juga terhubung dengan jalan-jalan protokol lainnya, seperti jalan Ahmad Yani, jalan Gajah Mada, jalan Pandanaran, dan jalan Pahlawan, maka semua jalan yang terhubung dengan kawasan Simpang Lima harus ditata agar tidak mengotori keindahan Simpang Lima. Jalan Pahlawan yang pada malam hari padat dengan para PKL harus ditata, apalagi di jalan tersebut terdapat kantor Gubernur Jawa Tengah dan kantor DPRD Jawa Tengah. Di jalan tersebut juga terdapat kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan kantor Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Penataan kawasan jalan Pahlawan, termasuk penertiban para pedagang menjadiprioritas dari kebijakan pemerintah Kota Semarang. Para PKL Pahlawan direlokasi ke jalan Menteri Soepeno.

Relokasi PKL jalan Pahlawan ke jalan Menteri Soepeno didasari oleh pertimbangan berikut. *Pertama*, untuk merealisasikan kebijakan penataan PKL sebagaimana diatur dalam Perda nomor 11 tahun 2000. *Kedua*,

untuk merealisasikan kebijakan SETARA atau Semarang Kota Sejahtera dari Walikota Soemarmo HS. *Ketiga*, untuk memikat investor agar mau menanamkan sahamnya ke Kota Semarang demi terwujudnya Semarang sebagai pusat perdagangan dan jasa.

### Respon PKL

Setiap orang atau kelompok sosial yang dikenai suatu kebijakan akan memberikan respons yang bermacam-macam, tergantung pada apakah kebijakan tersebut menguntungkan atau merugikan. Sikap atau tindakan seseorang atau kelompok terhadap suatu kebijakan sama halnya dengan responsnya terhadap suatu perubahan. Perubahan bisa membuat orang atau kelompok cemas dan *hopeless* yang menurut persepsinya bisa mengancam kelangsungan hidupnya, seperti halnya yang dialami pedagang kaki lima di Sampangan, Basudewo, dan Kokrosono ketika ditertibkan, digusur, dan direlokasi (Handoyo. 2012). Respons mereka bermacam-macam. Ada yang bisa beradaptasi (*adaptation*) dengan bersedia pindah ke sentra PKL yang disediakan oleh pemerintah, ada yang bisa menerima (*acceptance*) keputusan dan kebijakan pemkot untuk pindah atau sama sekali tidak bekerja sebagai PKL; ada yang kaget (*shock*), sehingga tidak bisa berbuat apa-apa kecuali pasrah; dan ada pula yang bersikap defensif (*defensive*), yakni bertahan di lokasi untuk melakukan pembelaan diri dengan melawan kebijakan yang ditempuh Pemkot. Dalam penelitian disertasi Handoyo (2012), respons PKL terhadap kebijakan relokasi, sikap yang paling dominan yang diperlihatkan oleh PKL adalah defensif, yaitu tetap bertahan di lokasi. Hasil penelitian disertasi Handoyo belum tentu sama dengan respon PKL di tempat lain, karena banyak faktor yang memengaruhi sikap dan perilaku PKL ketika mereka terkena kebijakan relokasi. Visualisasi dari respon PKL terhadap kebijakan relokasi dapat dilihat pada gambar berikut.



**Gambar 2.** Respon PKL terhadap Kebijakan Relokasi

Respon yang ditunjukkan pedagang jalan Pahlawan yang dipindahkan ke jalan Menteri Soepeno umumnya adalah menerima (*acceptance*) dan bisa beradaptasi (*adaptation*) dengan kebijakan relokasi. Awalnya mereka memang protes terhadap kebijakan pemkot, karena sebagian dipindahkan ke jalan Menteri Soepeno dan lainnya dipindahkan sementara ke jalan Imam Bardjo kampus Undip lama. Namun setelah shelter di jalan Menteri Soepeno selesai dibangun, mereka akhirnya bisa menerima (*acceptance*) dan beradaptasi dengan kebijakan pindah tersebut (*adaptation*). Hal ini sebagaimana diungkapkan Pak Tarno (48 tahun) sebagai berikut.

“Semula kita protes Pak, karena tempat baru belum beres...beberapa teman dipindahkan ke jalan Imam Bardjo, warung jadi sepi, tidak seperti halnya ketika kita jualan di Pahlawan. Tapi karena pemerintah punya kebijakan dan tempat baru akhirnya juga sudah bisa ditempati, ya kita terima saja” (wawancara dengan Pak Tarno, 15 September 2012).

Para pedagang kaki lima yang dipindahkan dari jalan Pahlawan ke jalan Menteri Soepeno sudah bisa menerima apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Fasilitas yang disediakan pemerintah, membuat pedagang merespons positif kebijakan relokasi tersebut.

“Semua fasilitas disediakan pak, apakah itu tempat berdagang, gerobak, listrik, air, semua ada...yang tidak ada hanya modal..kalau itu sih urusan kita, yang penting

kita tetap diperbolehkan berdagang..itu sudah lebih dari cukup” (wawancara dengan Bu Sukarni (53 tahun), 15 September 2012).

Sebagaimana diketahui bahwa fasilitas gerobak disediakan pemerintah Kota Semarang bekerjasama dengan perusahaan teh botol Sosro. Semua gerobak yang dibagikan gratis kepada para pedagang, bertuliskan Sosro. Bagi pedagang tidak menjadi masalah. Mereka merasa senang karena diberi kemudahan dan fasilitas untuk berdagang di tempat baru.

Untuk keperluan peningkatan pendapatan asli daerah, pemerintah kota menarik retribusi kepada pedagang. Dinas Pasar yang menangani PKL, menarik retribusi sebesar Rp. 8.000,00. Retribusi ini naik dari jumlah tahun 2011 yang hanya Rp. 4.000,00. Kenaikan tersebut tidak dipersoalkan oleh para pedagang. Selain membayar kontribusi kepada pemerintah, pedagang juga harus mengeluarkan uang untuk keperluan membayar listrik, air, dan keamanan, jumlahnya tidak lebih dari Rp. 10.000,00. Uang tersebut dikelola oleh paguyuban PKL dan secara akumulatif disetorkan kepada pemerintah melalui Dinas Pasar.

### **Adaptasi sosial dan ekonomi**

Adaptasi suatu kelompok sosial atau komunitas terjadi ketika mereka mengalami perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan terjadi ketika lingkungan mengalami perubahan (Saharuddin, 2009). Perubahan kebudayaan ditengarai sebagai perubahan dari luar yang meliputi perubahan lingkungan alam, sosial, dan binaan serta perubahan dari dalam diri masyarakat, yakni adanya inovasi dan perubahan struktur penduduk. Perubahan yang berasal dari luar akan menghasilkan pengetahuan baru dengan menggeser pengetahuan lama, agar masyarakat yang mengalami perubahan tersebut dapat beradaptasi dengan lingkungan baru. Demikian pula, perubahan lingkungan sosial akan memunculkan strategi baru dalam berinteraksi dengan lingkungan baru agar kelompok sosial atau komunitas dapat beradaptasi dan bertahan di lingkungan sosial yang baru.

Dari penelitian yang dilakukan, di-

temukan bahwa umumnya para PKL jalan Pahlawan yang direlokasi ke jalan Menteri Soepeno dapat beradaptasi dengan lingkungan baru, baik adaptasi sosial maupun ekonomi. Tidak seperti halnya, pengusaha besar yang ketika mengalami krisis keuangan, mereka bisa tertekan jiwanya (*stress*), tidak bisa berbuat apa-apa, karena segalanya serba mudah bagi mereka pada awalnya. Hal ini terbukti dari banyak pengusaha gulung tikar ketika mereka mengalami krisis moneter pada pertengahan tahun 1997. Berbeda dengan pedagang kecil, seperti halnya PKL, krisis tidak menjadi halangan bagi mereka. Mereka lebih kuat daya tahannya daripada pengusaha yang mendapatkan fasilitas lebih dari pemerintah. Adaptasi pedagang kecil relatif mudah, sebagaimana penuturan Bu Mul (30 tahun), pedagang es teler di jalan Menteri Soepeno.

“Kalau hanya soal bergaul dengan pedagang lain, meskipun kita tidak kenal-mudah kok mas...kita kan sama-sama senasib, sama-sama cari duit untuk makan. Namun yang berat, ya itu tadi, harus *babat alas* mas...cari pelanggan baru, karena pelanggan lama sudah pada kabur” (wawancara dengan Bu Mul, 16 September 2012).

Adaptasi sosial yang dilakukan pedagang jalan Pahlawan yang direlokasi ke jalan Menteri Soepeno tidak menimbulkan masalah di lingkungan baru. Umumnya, pedagang lama yang lebih dulu menempati lokasi PKL Menteri Soepeno dapat menerima kehadiran pedagang kaki lima dari jalan Pahlawan. Sebagaimana diungkapkan Bu Mul (36 tahun) berikut ini.

“Saya berdagang di sini sudah hampir dua tahun, tetapi nyatanya aman-aman saja, tidak ada yang memusuhi pak...mereka (pedagang lama) baik-baik kok” (wawancara dengan Bu Mul, 16 September 2012).

Para pedagang yang dipindahkan ke jalan Menteri Soepeno dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan baru, apalagi PKL yang sudah lama berdagang di jalan Menteri Soepeno tergolong tidak terorga-

nisasi, sehingga mereka tidak memiliki hak atas wilayah usahanya. Mereka tidak bisa menolak dan mengusir PKL Pahlawan, karena tanah atau ruang yang mereka tempati merupakan ruang publik. Pemerintahlah yang memiliki kewenangan mengatur ruang publik. Sudah 2 tahun lebih PKL Pahlawan yang pindah ke jalan Menteri Soepeno berjualan. Mereka sudah dapat menjalin interaksi antara sesama pedagang dari jalan Pahlawan maupun interaksi antara pedagang jalan Pahlawan dengan pedagang jalan Menteri Soepeno.

Dari aspek ekonomi, pada awal kepindahan ke jalan Menteri Soepeno, para pedagang kesulitan dalam meraih pelanggan baru, karena pelanggan lama sudah tidak lagi mengunjungi mereka. Dagangan menjadi sepi. Pada hari-hari biasa, di luar hari Minggu, mereka hanya bisa berjualan pada malam hari. Hari Minggu mereka bisa berjualan seharian hingga malam hari. Seiring berjalannya waktu, lokasi PKL jalan Menteri Soepeno mulai ramai didatangi pembeli. Setengah tahun setelah kepindahannya di jalan Menteri Soepeno, aktivitas perdagangan mulai ramai. Hal itu terlihat dari banyaknya sepeda motor yang diparkir di sekitar tempat para PKL berdagang. Pengunjung umumnya adalah anak-anak muda atau kalangan muda mudi. Para pedagang yang dipindahkan ke jalan Menteri Soepeno, hingga kini masih menjalankan aktivitas ekonomi di jalan Menteri Soepeno. Belum ada satu pun yang pindah ke tempat lain. Hal ini menunjukkan bahwa para pedagang yang direlokasi sudah dapat beradaptasi secara ekonomi.

### **Kontribusi Modal Sosial**

Dari berbagai penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa modal sosial (*social capital*) memiliki kontribusi terhadap pembangunan ekonomi. Penelitian ini pun menghasilkan kesimpulan serupa, meskipun tidak terlalu signifikan, bahkan ada kontribusi yang sifatnya tidak langsung. Kontribusi modal sosial bisa dilihat dari ketiga atau salah satu unsur dari modal sosial, yaitu kepercayaan, norma, dan jaringan sosial. Kepercayaan atau *trust* memberikan

sumbangan positif dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang. Sebagaimana dialami Pak Paimin (48 tahun) berikut ini.

“Saya berdagang nasi ayam goreng..modalnya tidak banyak kok pak, misalnya untuk beli ayam, saya tidak harus membayar kontan..bisa dicicil Pak atau mengambil dulu bayar belakangan..lha sudah kenal, maka mereka percaya pada kita” (wawancara dengan Pak Paimin, 16 September 2012).

Apa yang dialami Pak Paimin tidak hanya menunjukkan bahwa *trust* memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan Pak Paimin, karena dengan model “ambil barang dulu bayar kemudian”, Pak Paimin tetap bisa berjualan tanpa harus berpikir keras mencari uang untuk membeli ayam; tetapi menunjukkan pula bahwa Pak Paimin telah mampu membangun jaringan sosial dengan pelaku ekonomi lainnya di luar komunitas PKL yang ada di jalan Menteri Soepeno. Untuk barang dagangan, berupa ayam goreng, Pak Paimin mengambil ayam dari tempat pemotongan unggas di Penggaron Semarang, suatu tempat yang cukup jauh dari sentra PKL Menteri Soepeno, kira-kira membutuhkan setengah jam perjalanan darat.

Jaringan sosial yang dibangun oleh Pak Paimin memang sifatnya masih sebatas relasi yang terjadi antara Pak Paimin dengan penjual ayam di Penggaron. Jaringan sosial juga dapat dilihat dari interaksi yang terjadi dalam organisasi internal PKL Menteri Soepeno dan interaksi eksternal paguyuban PKL Menteri Soepeno dengan PPKLS yang diketuai Mbak Rini. Keberadaan PPKLS memiliki kontribusi besar bagi kelangsungan usaha dan kesejahteraan pedagang. Berkerjasama dengan LBH Semarang, PPKLS dapat mendesak Pemkot Semarang untuk menata lokasi PKL Menteri Soepeno sebelum memindahkan PKL Pahlawan. Selain itu, PPKLS juga berhasil mendesak Pemkot memfasilitasi PKL Pahlawan yang dipindah ke jalan Menteri Soepeno untuk berdagang di tempat yang nyaman, disediakan fasilitas listrik dan air yang sangat dibutuhkan para pedagang. Parkir dan kebersihan juga difasi-

litasi oleh pemkot.

“Kita beruntung dibantu PPKLS Pak... kalau tidak ...kita tidak bisa berjualan seperti ini. Semula kita hanya diberi tempat 2,5 x 3 m, tetapi berkat perjuangan paguyuban dan PPKLS..akhirnya kita diberi tempat seluas 2,5 x 4 m..lumayan Pak tidak terlalu sempit” (wawancara dengan Pak Paimin, 16 September 2012).

Selain berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang, modal sosial, utamanya organisasi yang dimiliki PKL juga memiliki peran dalam melakukan pengendalian sosial. Arisan yang dilaksanakan setiap bulan sekali, dijadikan sebagai sarana untuk membangun kebersamaan di antara para pedagang. Mereka yang tidak pernah datang arisan akan merasa malu, karena tiap bertemu pasti ditanya oleh anggota paguyuban lainnya. Pernah suatu ketika ada seorang pedagang yang tidak bertanggung jawab terhadap shelter yang ia tempati. Tempatnya kotor tidak dibersihkan. Paguyuban sudah memperingatkan, tetapi tidak digubris, akhirnya dilaporkan ke Dinas Pasar, sehingga untuk sementara waktu tempat jualannya disegel, tidak dapat digunakan untuk berjualan. Setelah pedagang tersebut memperbaiki perilakunya, tempat jualan baru boleh digunakan.

Kesejahteraan yang diperoleh para pedagang sebagaimana data lapangan yang telah diolah, tidak diartikan sebagai terpenuhinya semua kebutuhan pedagang, baik kebutuhan jasmaniah maupun rohaniah. Kesejahteraan yang dimaksudkan dalam konteks kehidupan PKL adalah bagaimana agar mereka tetap dapat bekerja dengan aman, nyaman, dan tenteram, sehingga mereka dapat mencukupi kebutuhan keluarganya. Itu saja. Mereka tidak menghendaki semua kebutuhan terpenuhinya, seperti halnya yang dialami orang-orang kaya. Asal bisa makan, kerja tidak dikejar-kejar petugas, itu sudah lebih dari cukup bagi pedagang. Orang Jawa bilang, mereka tidak ingin “neko-neko”.

Menjadi orang kecil, seperti pedagang kaki lima, tidak bisa diminta dan juga tidak bisa ditolak. Orang kecil, yang tidak memi-

liki kekuasaan, tidak memiliki modal yang cukup, dan keterampilan seadanya, memang rentan dari kekuasaan pihak lain. Pedagang, seperti rakyat kecil lainnya umumnya mengalami nasib yang tidak begitu mengembirakan dibandingkan para pedagang atau pengusaha berduit. Kondisi ini terjadi, utamanya pada pedagang yang menjajakan barang dagangannya di ruang publik. Tidak jarang pedagang ini disingkirkan dari ruang publik, karena dianggap mengganggu keamanan, keindahan, kerapian dan ketertiban kota (Handoyo. 2012).

PKL cenderung lemah kondisinya, dikarenakan modalnya terbatas, pasarnya terbatas, kembalian ekonominya terbatas, dan tingkat standar hidupnya rendah (Suharto. 2002: 116). Sektor informal ini juga penuh resiko dan probabilitas kegagalannya tinggi, apalagi kebijakan pemerintah lokal selama ini tidak pernah menjangkau lapisan pekerja yang tidak terdaftar ini. Pemberian kredit, modal usaha, jaminan sosial, jaminan asuransi, lahan yang memadai, dan perlindungan hukum, tidak pernah diterima para pekerja sektor informal, terlebih mereka yang bekerja sebagai pedagang kaki lima liar atau tidak terdaftar. Padahal sektor ini merupakan entitas ekonomi yang tidak kecil peranannya bagi pembangunan ekonomi nasional dan daerah. Suharto (2002: 119) memperkirakan bahwa separuh dari para pengangguran baru diserap oleh sektor informal. Di Jakarta dan Bandung pascakrisis, pertumbuhan PKL diperkirakan mencapai angka 300% (Suharto. 2002: 120).

Sebaliknya, pengusaha berkantong tebal dapat dengan leluasa membangun bisnisnya dengan mendirikan gedung atau membeli salah satu ruko untuk menjalankan usahanya, izin bagi mereka tidak menjadi soal. Uang yang mereka miliki menjadi mediator canggih untuk memperlancar kegiatan bisnisnya. Hal ini tidak dialami oleh para pedagang kecil yang duitnya serba pas-pasan.

Relokasi yang dialami pedagang kaki lima jalan pahlawan ke sentra PKL jalan Menteri Soepeno merupakan wujud dari ketidakberdayaan pedagang kecil. Mereka objek pembangunan, yang dengan mudah

dipindahkan oleh pihak pemerintah yang merancang pembangunan. Meskipun mereka menerima apa yang menjadi kebijakan pemerintah, misalnya demi meningkatkan keindahan, kerapian, kesehatan, keamanan, dan kenyamanan kota, tetapi sesungguhnya mereka merasa dirinya tidak dihargai sebagai manusia yang memiliki hak asasi ekonomi.

Pada awal dipindahkan ke lokasi PKL jalan Menteri Soepeno, para pedagang sempat protes, karena ada di antara mereka yang ditempatkan sementara di jalan Imam Bardjo. Pada awal mereka menempati lokasi baru di jalan Menteri Soepeno, dagangan mereka sepi pembeli. Cukup banyak pelanggan yang lari. Mereka harus memulai dari baru untuk merintis usaha di jalan Menteri Soepeno. Bahkan ada di antara mereka yang banting stir, pindah pada usaha atau bisnis dagang lainnya, misalnya yang dilakukan Pak Tarno. Sebelumnya ia berdagang rokok di jalan Pahlawan, namun setelah pindah ke jalan Menteri Soepeno, ia beralih berjualan makanan.

Atas dukungan PPKLS dan LBH Semarang, tuntutan PKL Pahlawan yang dipindah ke jalan Menteri Soepeno sebagian besar dipenuhi Pemkot Semarang. Tuntutan itu diantaranya, disediakan fasilitas tempat yang memadai, gerobak, listrik, air, parkir, dan keamanan. Boyongan dari jalan Pahlawan ke jalan Menteri Soepeno berjalan tertib, disertai dengan kegiatan arak-arakan yang diikuti oleh semua PKL yang direlokasi. Pada malam harinya, Pemkot mementaskan wayang kulit untuk memberi hiburan sekaligus sebagai wujud rasa syukur atas kelancaran penataan PKL jalan Pahlawan.

Respon PKL terhadap kebijakan relokasi yang ditetapkan Pemkot cenderung positif, mereka dapat menerima (*acceptance*) dan beradaptasi (*adaptation*) dengan lingkungan baru, meskipun pada awalnya mereka kesulitan mencari pelanggan, karena pelanggan lama di jalan Pahlawan sudah tidak lagi menjadi pembeli tetap di warungnya.

Modal sosial yang inti dari penelitian ini, memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan pedagang. Kesejahteraan yang dimaksud di sini, tidak hanya berkaitan

dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, seperti pangan, pakaian, dan rumah, tetapi juga berhubungan dengan terpenuhinya rasa aman dan nyaman dalam melakukan aktivitas ekonomi. Kesejahteraan yang dapat dinikmati PKL di jalan Menteri Soepeno, karena difasilitasi oleh paguyuban PKL Taman KB Bersatu yang didukung oleh PPKLS dan LBH Semarang. Atas negosiasi dan desakan dari PPKLS dan LBH Semarang, PKL dapat berdagang secara bebas di jalan Menteri Soepeno. Fasilitas, seperti *shelter* untuk tempat berdagang, gerobak, listrik, air, area parkir, dan keamanan disediakan oleh Pemkot. Hal ini tidak akan terlaksana tanpa adanya relasi sinergis antara pedagang, paguyuban PKL, PPKLS, dan LBH Semarang. Hal ini sejalan dengan pandangan Skinner (2008) yang menyatakan bahwa organisasi sosial, melalui jaringan, norma, dan *trust* dapat memfasilitasi kerjasama yang saling menguntungkan.

## SIMPULAN

Dari penelitian ini dapat dikemukakan beberapa simpulan berikut. *Pertama*, latar belakang Pemkot Semarang memindahkan PKL jalan Pahlawan ke jalan Menteri Soepeno adalah untuk mewujudkan Kota Semarang sebagai pusat perdagangan dan jasa berskala internasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. *Kedua*, secara umum PKL yang dipindahkan ke jalan Menteri Soepeno dapat menerima kebijakan Pemkot dan beradaptasi secara sosial dan ekonomi dengan lingkungan baru. *Ketiga*, modal sosial, utamanya *trust* dan *networking* berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang, yaitu terpenuhinya kebutuhan minimal pedagang yang dalam jangka panjang menjamin kelangsungan hidup pedagang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ari, B. 2008. "Penanganan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung Dengan Perspektif Kebijakan Publik". Dalam *Jurnal Pendidikan Profesional Volume IV No. 19*, November 2008.
- Beugelsdijk, S. 2002. *Mapping the Landscape of Social Capital in Economics*. Unpublished Manuscript Tilburg University The Netherlands.
- Bogdan, R dan Steven, J. Taylor. 1992. *Pengantar*

- Metode Penelitian Kualitatif*. Terjemahan Ali Furchon. Surabaya: Usaha Nasional.
- Brannen, J. 1997. *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Terjemahan Nuktah Arfawie Kurde, dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bromley, R. 2000. "Street Vending and Public Policy : a Global Review". In *The International Journal of Sociology and Social Policy Volume 20 Number 1/2 2000 pp.1-28*.
- Castiglione, D. et.al. 2008. "Social Capital's Fortune : An Introduction". In Dario Castiglione, et.al (ed). *The Handbook of Social Capital*. New York : Oxford University Press.
- Coleman, J.S. 2000. "Social Capital in The Creation of Human Capital". In Partha Dasgupta and Ismail Serageldin. *Social Capital A Multifaceted Perspective*. Washington DC : The World Bank.
- Creswell, J.W. 2007. *Qualitative Inquiry and Research Design Choosing Among Five Approach Second Edition*. London : SAGE Publications.
- Destombes, T. 2010. *Informal Entrepreneurs : Street Vendors, Their Livelihoods and the Influence of Social Capital*. Master Thesis International Development Studies USC UU.
- Field, J. 2008. *Social Capital Second Edition*. New York : Routledge.
- Fukuyama, F. 2005. *Guncangan Besar Kodrat Manusia dan Tata Sosial Baru*. Terjemahan Masri Maris. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Gootaert, C. 2001. *Does Social Capital help the Poor? A Synthesis of Findings from the Local Level Institution Studies in Bolivia, Burkina Faso, and Indonesia*. Lokal Level Institution Working Paper No. 10. Washington DC: The World Bank.
- Handoyo, E. 2012. "Eksistensi Pedagang Kaki Lima Studi tentang Kontribusi Modal Sosial terhadap Resistensi PKL di Semarang". *Disertasi Program Doktor Studi Pembangunan Program Pasca Sarjana UKSW Salatiga*.
- Harrison, L. 2007. *Metodologi Penelitian Politik*. Terjemahan Tri Wibowo B.S. Jakarta : Prenada Media Group.
- Helliwel, J.F. 2006. "Well-being, Social Capital and Public Policy What's New ?" in *The Economic Journal*. 116 (March). C34-45.
- Jenkins, R. 2004. *Membaca Pikiran Pierre Bourdieu*. Terjemahan Nurhadi. Yogyakarta : Kreasi Wacana.
- Kusakabe, K. 2006. *On the Borders of Legality: A Review of Studies on Street Vending in Phnom Penh Cambodia. Informal Economy, Poverty and Employment Cambodia Series Number 4*. Bangkok: ILO.
- Lawang, R.M.Z. 2005. *Kapital Sosial Dalam Perspektif Sosiologik Suatu Pengantar*. Jakarta : FISIP UI PRESS.
- Manning, C. and Kurny, R. 2006. "Survey of Recent Developments". In *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 42 (2), pp 143-170.
- Maxwell, J.A. 1996. *Qualitative Research Design An Interactive Approach*. London : SAGE Publications.
- Melvy, J.M. 2002. *Writing The Qualitative Dissertation Understanding by Doing*. London : SAGE Publications.
- Miles, M.B. dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI-Press.
- Moelyono, M. 2010. *Mengerakkan Ekonomi Kreatif Antara Tuntutan dan Kebutuhan*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Moleong, L.I. 1993. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Morrell, E., dkk. 2008. *Tata Kelola Ekonomi Informal Policy Brief 11*. Australia : Crawford School of Economics and Government the Australian National University.
- Patton, M.Q. 2009. *Qualitative Evaluation Methods*. London and New Delhi: Sage Publication, Inc.
- Putnam, Robert D. 2000. *Bowling Alone The Collapse and Revival of American Community*. New York : Simon and Schuster Paperbacks.
- Ramli, R. 1992. *Sektor Informal Perkotaan Pedagang Kaki Lima*. Jakarta : Ind-Hill-Co.
- Sethuraman, S.V. 1976. "The Urban Informal Sector : Concept, Measurement and Policy". In *International Labour Review Vol. 114 No. 1 July-Agustus 1976*.
- SEWA. 2000. *Legal Empowerment and the Informal Economy SEWA Experience*. Presented at Regional Dialogue on Legal Empowerment for the Poor, 3-5 March 2000, Bangkok.
- Skinner, C. 2008. *Street Trade in Africa: a Review*. University of KWAZULU-NATAL: School of Development Studies Working Paper No. 51.
- Sugiono, M. 1999. Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Suharto, E. 2002. "Human Development and the Urban Informal Sector in Bandung Indonesia: the Poverty Issue". in *New Zealand Journal of Asian Studies* 4, 2 (Desember 2002). Pp. 115-133.
- Yasmeen, G. 2000. *Workers in the Urban Informal Food Sector : Innovative Organizing Strategies*. Paper prepared for the Regional Seminar on Feeding Asian Cities, held in Bangkok from 27 to 30 November 2000.